

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**RENCANA KERJA
(REK 2022)**

KABUPATEN FLORES TIMUR

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA.....	5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	15
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	17
2.5 PENELAAHAN TERHADAP USULAN MASYARAKAT.....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	35
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	35
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	35
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	35
BAB IV TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	37
BAB V PENUTUP.....	43

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaanNya sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat disusun.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen RKPD yang merupakan perpaduan antara rancangan awal RKPD dan usulan masyarakat. Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPPKBPPPA tahun 2022 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian dokumen Renja ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritikan dan saran masukan demi penyempurnaan untuk penyusunan dan penyajian dokumen yang sama pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja (Renja) DPPKBPPPA Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh DPPKBPPPA Kabupaten Flores Timur.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur



SN. ARDI RAHMAN, S.Sos, MAP
Pembina Tk. I
NIP. 196918161990032007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Perubahan Renja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Flores Timur. Penyusunan Renja DP2KBP3A dikerjakan berfokus pada dokumen RKPD, dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DP2KBP3A, evaluasi pelaksanaan Renja DP2KBP3A tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur.

Perubahan Renja DPPKBPPPA Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 - 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;

15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2022 adalah tersedianya dokumen rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022 serta Renstra OPD dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja OPD DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur adalah:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Menyediakan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur tahun 2022.
- c. Memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2022; dan
- d. Menyediakan data dan informasi bagi publik terkait pelaksanaan pembangunan sesuai bidang urusan yang diemban DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DP2KBP3A, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja DP2KBP3A, Proses Penyusunan Renja DP2KBP3A, Keterkaitan antara Renja DP2KBP3A dengan Dokumen RKPD dan Renstra DP2KBP3A
- 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja DP2KBP3A Tahun 2022.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja DP2KBP3A.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DP2KBP3A, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP2KBP3A Tahun Lalu Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja DP2KBP3A Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

- Page 14
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP2KBP3A Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP2KBP3A.
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP2KBP3A.
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP2KBP3A
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DP2KBP3A Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP2KBP3A
- 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja OPD tahun lalu (tahun 2020). Renja 2020 merupakan tahun ketiga dari periode RPJM 2017- 2022. Terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan dalam penyusunan renja tahun 2018-2020 dengan penyusunan renja pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan pendekatan regulasi yang digunakan pada periode 2018-2020 adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan penyusunan renja tahun 2021 dan 2022 menggunakan Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2020 dan capaian Renstra DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DP2KBP3A dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja perangkat Daerah
s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Flores Timur

Nama Perangkat Daerah: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

2.08.2.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran								
2.08.2.08.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat	2,417	109	500	109	22	500	718	30
2.08.2.08.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	24	12	12	100	12	48	80
2.08.2.08.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	5	5	5	5	100	5	5	100
2.08.2.08.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penerima Jasa administrasi pengelola keuangan	7	7	7	7	100	7	7	100
2.08.2.08.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan	74	15	15	15	100	15	45	61
2.08.2.08.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	237	45	50	45	90	50	140	59
2.08.2.08.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	801,467	58,750	136,667	58,750	43	136,667	254,167	32
2.08.2.08.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor	8,133	367	1,889	367	19	2,000	2,734	34
2.08.2.08.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	422	68	95	68	72	100	236	56
2.08.2.08.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	74	74	74	74	100	74	74	100
2.08.2.08.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
2.08.2.08.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi keuangan dan laporan tahunan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
2.08.2.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100							
2.08.2.08.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Kelengkapan Gedung Kantor	4	4	4	4	100	2	10	250

[illegible]

2.08.2.08.01.17.06	Dukungan Operasional Bagi Klinik KB (Kecamatan dan RS)	Jumlah Klinik yang mendapat Dukungan operasional	63	63	63	63	100	63	63	100
2.08.2.08.01.17.07	Dukungan Operasional Bagi PLKB	Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional	74	74	74	74	100	74	74	100
2.02.2.08.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina dan di fasilitasi								
2.02.2.08.01.16.05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah penguatan Kelembagaan Anak	74	0	74	0	0	55	55	74
2.02.2.08.01.16.12	Pembentukan dan Fasilitasi Forum Anak	Jumlah Forum Anak yang dibentuk	95	0	19	0	0	19	19	20
2.02.2.08.01.17	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan yang diintervensi								
2.02.2.08.01.17.13	Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan	Frekwensi Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan	4	0	1	0	0	1	1	25

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan Serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. Penetapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Upaya DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator sesuai tugas dan fungsi yang diemban sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+ 1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat			500	500	2,417		109	83	2,417	12	
2	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	12	12		12	6	12	12	
3	Jumlah kendaraan dinas/operasional			5	5	5		5	6	5	5	
4	Jumlah Penerima Jasa administrasi pengelola keuangan			7	7	7		7	7	7		
5	Jumlah Alat Kebersihan			15	15	74		15	9	74	15	
6	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor			50	50	237		45	8	237	50	
7	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan			136,667	136,667	801,467		58,750	18609	801,467	50000	
8	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor			1,889	2,000	8,133		367	95	8,133	2000	
9	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi			95	100	422		68	19	422	70	

10	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran			74	74	74		74	74	74	75	
11	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			4	4	4		4	4	4	7	
12	Jumlah Jenis Kelengkapan Gedung Kantor			4	2	4		4	0	4	5	
13	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			12	12	12		12	6	12	12	
14	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			5	5	5		4	0	5	5	
15	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor			3	3	3		3	0	3	4	
16	Jumlah Peserta KB yang Dibina			15,700	15,800	16,000		900	0	16,000	15800	
17	Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan			5	5	5		5	5	5	5	
18	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Perlengkapan di Kecamatan			3	3	19		3	0	19		
19	Jumlah Laporan Evaluasi Tahun dan PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) Tahun Berjalan			1	1	1		1	0	1	1	
20	Jumlah Peserta			150	150	750		0	0	750		

	Sosialisasi											
21	Jumlah Peserta Konseling KB			250	250	1,250		0	0	1,250	250	
22	Jumlah Klinik yang mendapat Dukungan operasional			63	63	63		63	0	63	63	
23	Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional			74	74	74		74	0	74	80	
24	Jumlah penguatan Kelembagaan Anak			74	55	74		0	0	74		
25	Jumlah Forum Anak yang dibentuk			19	19	95		0	0	95	19	
26	Frekwensi Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan			1	1	4		0	0	4	1	

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa masih ada program / kegiatan tidak dapat memenuhi target seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi dunia yang berdampak pada semua sektor kehidupan. Pandemi covid-19 membawa dampak yang sangat besar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembatasan-pembatasan sosial yang diterapkan mengakibatkan pada tidak terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan secara lebih maksimal. Kebijakan soal refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 juga sangat berdampak pada pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA, didasarkan pada indikator kinerja daerah dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA. Berdasarkan indikator kinerja dan kondisi permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB.
2. Masih banyak kehamilan dengan “4 terlalu” yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat
3. Minimnya tenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
4. Pengambilan keputusan untuk ber-KB bagi Pasangan Usia Subur masih sangat bergantung pada keputusan keluarga
5. Kurangnya dukungan lintas sector dalam KB
6. Upaya pengakhiran masa reproduksi bagi pasangan dengan jumlah anak lebih dari 4 (empat) atau usia ibu lebih dari 35 tahun dengan metode operasi wanita dan ,metode operasi pria, belum dilaksanakan secara optimal, baik dari aspek biaya, tenaga penyuluh, dan tim kesehatan.
7. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
8. Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan social, ekonomi, budaya dan politik belum memadai.
9. Penerapan Pengarusutamaan Gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal.
10. Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak berperan secara maksimal.
11. Fasilitas sarana prasaranan public yang tersedia belum semuanya responsive gender.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum semua target-target indikator kinerja sasaran strategis (outcome) dan target kinerja kegiatan (output) yang direncanakan dapat direalisasikan belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Rata- rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Unmetneed tinggi Pernikahan Perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga
	Meningkatnya penduduk yang ber KB	DO Tinggi dan rendahnya tingkat kepesertaan KB
2	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Peran Perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
	Meningkatnya Capaian indeks pemberdayaan gender	penghargaan perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Penerapan Pengarusutamaan gender dalam peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak berperan secara maksimal
4	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia	Facilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender
	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	
	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil berbagai langkah kebijakan yaitu :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Solusi
1	Meningkatnya Rata- rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Unmetneed tinggi Pernikahan Perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelayanan KB	Adanya komitmen peningkatan KIE pelayanan KB
	Meningkatnya penduduk yang ber KB	DO Tinggi dan rendahnya tingkat kepesertaan KB	Rendahnya kualitas pelayanan KB	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB
2	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Peran Perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal	Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender belum optimal	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya Capaian indeks pemberdayaan gender	penghargaan perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender	
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Penerapan Pengarusutamaan gender dalam peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak berperan secara maksimal		
4	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia	Facilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak
	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak

2.4 Review Terhadap Rancangan Renja

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awl RKPD Tahun 2022

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Flores Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				3,871,520,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				3,871,520,000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,871,520,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,871,520,000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur					Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			4	30,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			4	30,000,000	

Kinerja Perangkat Daerah					Kinerja Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan capaian kinerja, relisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	4	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan capaian kinerja, relisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	4	30,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,182,520,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,182,520,000
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Frekwensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	2,129,000,000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Laranyuka (OPD)	Frekwensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	2,129,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah penerima Jasa administrasi pengelola keuangan (bulan)	12	53,520,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah penerima Jasa administrasi pengelola keuangan (bulan)	12	53,520,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				216,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				216,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang disediakan (jenis)	5	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang disediakan (jenis)	5	40,000,000
		Jumlah peralatan gedung kantor (jenis)	3	25,000,000			Jumlah peralatan gedung kantor (jenis)	3	25,000,000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah alat kebersihan (jenis)	20	4,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah alat kebersihan (jenis)	20	4,500,000	
			Jumlah Jenis alat tulis kantor (Jenis)	32	38,000,000			Jumlah Jenis alat tulis kantor (Jenis)	32	38,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan (lembar)	5000	20,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan (lembar)	5000	20,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Makanan minuman kantor (dos)	400	24,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Makanan minuman kantor (dos)	400	24,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	55	65,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	55	65,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,342,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,342,500,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	120	1,100,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	120	1,100,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	58,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	58,000,000	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	93	1,283,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	93	1,283,400,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa perizinan (unit)	5	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa perizinan (unit)	5	15,000,000
		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	5	55,000,000			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	5	55,000,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1	15,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1	15,000,000

Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Terlaksannya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor (jenis)	3	15,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Terlaksannya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor (jenis)	3	15,000,000
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				537,000,000	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				537,000,000
Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani (%)	20	312,000,000	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani (%)	20	312,000,000
		Jumlah lembaga perempuan dan anak yang dibina	19				Jumlah lembaga perempuan dan anak yang dibina	19	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	100				Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	100	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				92,000,000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				92,000,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kota/Kabupaten	19 Kec	Jumlah penguatan kelembagaan Anak (lembaga)	1	35,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kota/Kabupaten	19 Kec	Jumlah penguatan kelembagaan Anak (lembaga)	1	35,000,000
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Larantuka Ibukota Kabupaten	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	150	57,000,000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Larantuka Ibukota Kabupaten	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	150	57,000,000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				220,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				220,000,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	19 Ke. (Wotan Ulumando: Desa Wotanulumbo), (Ile Mandiri: Riangkemie, Tersebar di 3 dusun) (Solor Selatan: Sulengwasing) (Solor Timur: Desa Motonwutu)	Jumlah Kelompok bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)	48	100,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	19 Ke. (Wotan Ulumando: Desa Wotanulumbo), (Ile Mandiri: Riangkemie, Tersebar di 3 dusun) (Solor Selatan: Sulengwa)	Jumlah Kelompok bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)	48	100,000,000

		n (Dusun I,II, dan III), Solor Barat: Desa Titehena, Kalelu, Lamawalang , Balaweling I, Desa Balaweling II dan Desa Nusadani) (Larantuka: Pohon Sirih, PTW Bao Lingk. Kampung Tengah dan Lingkungan Lebao), (Solor Barat: Desa Titehena)				seng) (Solor Timur: Desa Motonw utun (Dusun I,II, dan III), Solor Barat: Desa Titehena, Kalelu, Lamawal ang, Balaweli ng I, Desa Balaweli ng II dan Desa Nusadani) (Larantuk a: Pohon Sirih, PTW Bao Lingk. Kampung Tengah dan Lingkung an Lebao),			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

							(Solor Barat: Desa Titehena)				
			Jumlah hasil karya perempuan (jenis)	5	120,000,000			Jumlah hasil karya perempuan (jenis)	5	120,000,000	
	Program Perlindungan Perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani (%)	20	110,000,000	Program Perlindungan Perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani (%)	20	110,000,000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				110,000,000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				110,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah Advokasi dan Layanan perlindungan Perempuan (Kali)	1	110,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah Advokasi dan Layanan perlindungan Perempuan (Kali)	1	110,000,000	

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
		Jumlah Perempuan yang diintervensi (orang)	125	50,000,000			Jumlah Perempuan yang diintervensi (orang)	125	50,000,000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Perempuan yang diintervensi		50,000,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Perempuan yang diintervensi		50,000,000
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten	Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (kali)	1	50,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten	Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (kali)	1	50,000,000
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga)	19	65,000,000	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga)	19	65,000,000
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		65,000,000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan		Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		65,000,000

						Kabupaten/Kota					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)	19	65,000,000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)	19	65,000,000	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				7,707,000,000		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				7,707,000,000	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	100			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	100		
		Cakupan Akseptor Baru (%)	100					Cakupan Akseptor Baru (%)	100		
		Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)	100					Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)	100		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				7,477,000,000		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				7,477,000,000	

Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Ibu Kota Kaputen	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi (orang)	76	52,500,000	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Ibu Kota Kaputen	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi (orang)	76	52,500,000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Kec	Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis)	5	7,235,000,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Kec	Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis)	5	7,235,000,000

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Alkon dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket)	1	20,000,000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Alkon dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket)	1	20,000,000
		Kendaraan roda dua jempit antarakseptor/pendamping keluarga stunting (unit roda 2)						30	
		Jumlah BKB Kit yang diadakan (unit)						231	
		Jumlah KIT siap nikah yang diadakan (unit)						22	
		Jumlah sarana Prasarana SIGA/Personal Komputer yang diadakan (unit)						16	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	19 Kec	Jumlah Peserta KB yang dibina (orang)	15800	30,000,000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	19 Kec	Jumlah Peserta KB yang dibina (orang)	15800	30,000,000

Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
			Jumlah Peserta Konseling KB (orang)	250	25,000,000			Jumlah Peserta Konseling KB (orang)	250	25,000,000
			Jumlah Remaja yang dibina (orang)	60	20,000,000			Jumlah Remaja yang dibina (orang)	60	20,000,000
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	19 Kec		Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional (Klinik)	61	32,500,000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	19 Kec	Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional (Klinik)	61	32,500,000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					62,000,000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				62,000,000

Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	19 Kec	Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan (dokumen)	1	12,000,000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	19 Kec	Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan (dokumen)	1	12,000,000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Desa Ongalereng (Solbar), Desa Kolaka (Tanjung Bunga), Desa Lamalota (Adonara Timur), Desa Kenere (Solsel), Adobala (Klubagolit)	Jumlah Kampung KB yang dibentuk (Desa)	5	50,000,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Desa Ongalere ng (Solbar), Desa Kolaka (Tanjung Bunga), Desa Lamalota (Adonara Timur), Desa Kenere (Solsel), Adobala (Klubagolit)	Jumlah Kampung KB yang dibentuk (Desa)	5	50,000,000
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)	80	230,000,000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)	80	230,000,000

2.5 Penelahaan Terhadap Usulan Masyarakat

Dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 ada beberapa usulan masyarakat yang berkaitan dengan rencana kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tbel TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Flores Timur

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Asas/Volun	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kota/Kabupaten	19 Kec	Jumlah penguatan kelembagaan Anak (lembaga)	2 Lembaga	
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Larantuka Ibukota Kabupaten	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	150 Orang	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	19 Ke. (Wotan Ulumando: Desa Wotanulumado), (Ile Mandiri: Riangkemie, Tersebar di 3 dusun) (Solor Selatan: Sulengwaseng) (Solor Timur: Desa Motonwutun (Dusun I, II, dan III), Solor Barat: Desa Titehena, Kalelu, Lamawalang, Balaweling I, Desa Balaweling II dan Desa Nusadani) (Larantuka:	Jumlah Kelompok bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)	10 Kelompok	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga)		
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)	2 Forum	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		
			Cakupan Akseptor Baru (%)		
			Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				

Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Ibu Kota Kaputen	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi (orang)		
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Kec	Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis)		
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Alkon dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket)		
		Kendaraan roda jempit antar akseptor/pendampingan keluarga stunting (unit Roda 2)		
		Jumlah BKB Kit yang diadakan (unit)	2 unit	
		Jumlah Kit Siap Nikah yang diadakan (unit)		
		jumlah sarana prasarana SIGA/ Personal Komputer yang diadakan (unit)		
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Kec	Jumlah Peserta KB yang dibina (orang)		
		Jumlah Peserta Konseling KB (orang)		
		Jumlah Remaja yang dibina (orang)		
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	19 Kec	Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional (Klinik)		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	19 Kec	Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan (dokumen)		
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Desa Ongalereng (Solbar), Desa Kolaka (Tanjung Bunga), Desa Lamalota (Adonara Timur), Desa Kenere (Solse), Adobala	Jumlah Kampung KB yang dibentuk (Desa)	8 Desa	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh DP2KBP3A lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh DPPKBPPPA Kabupaten Flores Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP2KBP3A

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Flores Timur dan isu- isu strategis , maka tujuan dan sasaran urusan DP2KBP3A adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terselamatkannya orang muda dari masalah sosila budaya	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Cakupan PUS Peserta KB Aktif
		Cakupan Akseptor Baru
		Jumlah PIK Remaja yang Aktif
		Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang di Bina
	Meningkatnya peran perempuan dan anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani
		Jumlah Lemabaga Perempuan dan anak yang terbina
		Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang difasilitasi
		Jumlah Perempuan yang diintervensi
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rancangan awal Perangkat Daerah pada RKPD mencakup 7 program terdiri 14 Kegiatan dan 29 Sub kegiatan yaitu:

A. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota memiliki 8 Kegiatan yaitu:
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang politik Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota

2. Program Perlindungan Perempuan

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota

3. Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender

a. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kab/Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota

C. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana

a. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota

c. Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan maju Tahun 2023
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2-05	2-05-01	01			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			13,712,520,000						15,004,572,000
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,795,520,000						4,175,072,000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,795,520,000				PP	100	4,175,072,000
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	7						7	

						Jumlah Jenis ATK yang disediakan (jenis)	32	28,000,000					50	30,800,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan (lembar)	40000	16,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		50000	17,600,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor (dos)	250	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		2000	16,500,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	40	52,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		70	57,200,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,342,500,000			PP		1,476,750,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat (lembar)	120	1,100,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		12	1,210,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	58,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		12	63,800,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	93	1,283,400,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		75	1,411,740,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70,000,000			PP		77,000,000

x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa perizinan (unit)	5	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		5	16,500,000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	5	45,000,000				5	49,500,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (unit)	1	5,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		1	5,500,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor (jenis)	3	5,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		4	5,500,000
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang			438,800,000					403,480,000
2	08	02			Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	20	285,000,000			PU	100	234,300,000
						Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang terbina (Lembaga Anak dan Lembaga Perempuan)	19					19	

						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	100						100	
2	08	02	2.01			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			72,000,000				PU	
2	08	02	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Anak (Lembaga)	46	35,000,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			38,500,000
2	08	02	2.01	04		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	150	37,000,000	Larantuka-Ibukota Kabupaten	APBD II (DAU)		150	40,700,000
2	08	02	2			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			213,000,000		APBD II (DAU)		PU	234,300,000

2	08	02	2	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kelompok Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)	48	178,000,000	19 Ke. (Wotan Ulumando: Desa Wotanulumado), (Ile Mandiri: Riangkemie, Tersebar di 3 dusun) (Solor Selatan: Sulengwaseng) (Solor Timur: Desa Motonwutun (Dusun I, II, dan III), Solor Barat: Desa Titehena, Kalelu, Lamawalang, Balaweling I, Desa Balaweling II dan Desa Nusadani) (Larantuka: Pohon Sirih, PTW Bao Lingk. Kampung Tengah dan Lingkungan Lebao), (Solor Barat: Desa Titehena)	APBD II (DAU)		48	195,800,000
						Jumlah Hasil Karya Perempuan (jenis)	5	35,000,000	19 Kecamatan			5	38,500,000
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	20	82,000,000				PU	90,200,000
2	08	03	2		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			82,000,000				PU	90,200,000
2	08	03	2	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan Layanan Perlindungan Perempuan (Kali)	1	82,000,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			90,200,000

2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)	125	41,500,000				PP	125	45,650,000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		41,500,000						45,650,000
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (kali)	1	41,500,000	Ibukota Kabupaten	APBD II (DAU)			1	45,650,000
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga)	19	30,300,000		APBD II (DAU)		PU	19	33,330,000
2	08	06	2		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		30,300,000		APBD II (DAU)		PU		33,330,000
2	08	06	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)	19	30,300,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			19	33,330,000
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			9,478,200,000						10,426,020,000
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	100	9,317,000,000				PU	100	10,248,700,000

						Cakupan Akseptor Baru (%)	100						100	
						Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)	100						100	
2	14	03	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			42,500,000				PU		
2	14	03	2	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi (orang)	76	42,500,000	Ibukota Kabupaten	APBD II (DAU)				46,750,000
2	14	03	2		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		9,222,500,000				PU		
2	14	03	2	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis)	5	6,950,000,000	19 Kecamatan	APBD II (DAK)			5	7,645,000,000

2	14	03	2	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Alkon dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket):</i> - Kendaraan roda jempit antar akseptor/pendampingan keluarga stunting (unit Roda 2) - Jumlah BKB Kit yang diadakan (unit) - Jumlah Kit Siap Nikah yang diadakan (unit) - jumlah sarana prasarana SIGA/ Personal Komputer yang diadakan (unit)	30 231 22 16	2,175,000,000	Larantuka (OPD) 19 Kecamatan Desa/Kel: Boru, Lewolaga, Larantuka, Ritaebang, Titehena, Kalike, Waiwadan, Lite, Waiwerang Kota, Sagu, Adonara Balai Penyuluh KB Kec: Wulanggitan, Demon Pagong, Solor Barat, Solor Timur, Ado Barat, Ado Timur, Ile Boleng, Adonara, Witihama, Kelubagolit	APBD II (DAK)				2,392,500,000
2	14	03	2	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Jumlah Peserta KB yang dibina (orang)</i> <i>Jumlah peserta konseling KB (orang)</i>	15800 250	20,000,000 25,000,000	19 Kecamatan 19 Kecamatan	APBD II (DAU) APBD II (DAU)			15800 250	22,000,000 27,500,000

						Jumlah Remaja yang dibina (orang)	60	20,000,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)		60	22,000,000
2	14	03	2	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional (Klinik)	63	32,500,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)		61	35,750,000
2	14	03	2		Pemberdayaan dan Peningkatan			52,000,000			PU		
2	14	03	2	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan (dokumen)	1	12,000,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)		1	13,200,000
2	14	03	2	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk (Desa)	5	40,000,000	Desa Ongalereng (Solbar), Desa Kolaka (Tanjung Bunga), Desa Lamalota (Adonara Timur), Desa Kenere (Solsel), Adobala (Klubagolit)	APBD II (DAU)		5	44,000,000
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)	80	161,200,000			PP	80	177,320,000
2	14	04	2		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			161,200,000			PP		

2	14	04	2	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih (orang)	80	30,000,000	Ibukota Kabupaten	APBD II (DAU)			80	33,000,000
						Frekuensi orientasi dan sarasehan (kali)	1	22,000,000	Ibukota Kabupaten	APBD II (DAU)			2	24,200,000
2	14	04	2	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional (PLKB)	61	109,200,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			80	120,120,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2022. Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur

